

## Tinjauan Mata Kuliah

Reformasi perpajakan yang dilakukan di Indonesia sejak 1983, dengan dilakukannya perubahan undang-undang pajak di Indonesia, pemerintah menyatakan bahwa pajak harus dipandang sebagai hak masyarakat untuk berperan serta didalam pembangunan. Harus ada perubahan dalam pola pikir masyarakat yang sampai saat ini dipertengahan tahun 2016, masih belum tercapai perubahan secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari pemberian pengurangan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan perbaikan perhitungan pajak ditahun 2015, dan diupayakan amnesty dalam tahun 2016. Pungutan pajak dijelaskan berbeda dengan pungutan jenis lainnya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mata kuliah Hukum Pajak ini dirancang untuk membekali Anda dengan materi perpajakan di Indonesia sesuai dengan Ketentuan Umum dan tata cara dalam perpajakan di Indonesia. Sehingga tujuan instruksional umum matakuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dasar dasar perpajakan, yang mendasari ketentuan-ketentuan pelaksanaan perpajakan di Indonesia.

Untuk memudahkan Anda mencapai seluruh kemampuan tersebut, materi mata kuliah Hukum Pajak di disajikan dalam 9 (Sembilan) modul sebagai berikut.

### Modul 1: PENGANTAR PERPAJAKAN

KB 1 Ruang Lingkup Pengantar Perpajakan

KB 2 Hal-Hal Dalam Pengaturan Pajak

KB 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

KB 4 Dasar-Dasar Dalam Pemungutan Pajak

### Modul 2: ASPEK AKUNTANSI DAN HUKUM DALAM PERPAJAKAN DI INDONESIA

KB 2 Aspek Hukum dalam Perpajakan

KB 3 Penjelasan Pajak di Indonesia (Pajak Materiil dan Pajak

Formil Penjelasan Dalam Garis besar)

- Modul 3: PEMAHAMAN KUP SEBAGAI KETENTUAN FORMIL DAN CAKUPAN YANG DIATUR  
KB 1 Pemahaman KUP Sebagai Ketentuan Formil dan Cakupan Yang Diatur  
KB 2 Cakupan Pengaturan KUP dalam Perpajakan  
KB 3 Ringkasan Pengaturan dalam KUP
- Modul 4: KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN  
KB 1 Pembahasan Mengenai Verifikasi dalam Pengawasan Pemungutan Pajak  
KB 2 Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan  
KB 3 Penagihan Pajak, Keberatan Banding dan Gugatan
- Modul 5: VERIFIKASI, PEMERIKSAAN, DAN PEMERIKSAAN PERMULAAN, PENYIDIKAN DALAM PERPAJAKAN  
KB 1 Pembahasan Mengenai Verifikasi dalam Pengawasan Pemungutan Pajak  
KB 2 Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan  
KB 3 Penagihan Pajak, Keberatan Banding, dan Gugatan
- Modul 6: PENGADILAN PAJAK: PENGATURAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN PERPAJAKAN  
KB 1 Pengaturan dalam Undang Undang Pengadilan Pajak  
KB 2 Proses Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa – Banding Dan Gugatan di Pengadilan Pajak  
KB 3 Pembahasan Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak
- Modul 7: PENGADILAN PAJAK: PENGATURAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN PERPAJAKAN  
KB 1 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah  
KB 2 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah  
KB 3 Kebijakan dalam Penentuan Objek Pajak dan Retribusi

- Modul 8: PEMAHAMAN ATAS SANKSI DAN KONSEKUENSI DARI PENGATURAN PERUNDANGUNDANGAN DALAM PERPAJAKAN  
KB 1 pengaturan terkait Sanksi dalam undang undang KUP  
KB 2 Konsekuensi penting dalam Pengaturan Undang-Undang PPh dan PPN
- Modul 9: PROFESI AKUNTAN SEBAGAI PENUNJANG DALAM KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
KB 1 Pencatatan Transaksi Pajak  
KB 2 Dasar-dasar Penyusunan Laporan Hasil Bidang Akuntansi Untuk Kebutuhan Perpajakan

Diharapkan Anda mempelajari materi mata kuliah ini dengan cermat sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada di setiap modul. Anda juga perlu mengerjakan semua latihan maupun tes formatif yang diberikan dengan sungguh-sungguh sebagai umpan balik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang ada dalam modul. Hanya dengan upaya yang sungguh-sungguh, Anda akan berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini.

**Selamat Belajar dan Sukses Selalu!**

### Peta Kompetensi Hukum Pajak/EKSI4202/3sks

